



## PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

### SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 **•** (0295) 691472 Psw. 116 Fax. (0295) 691619

#### NOTULEN

Rapat	:	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Hari/ Tanggal	:	Senin/tanggal 13 Januari 2025
Waktu	:	Pukul 08.30 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Rembang Lt. II Kantor Bupati.
Pimpinan Rapat	:	
Ketua	:	H. Agus Salim, S.H.,M.H.
Wakil Ketua	:	Dedhy Nugraha, S.H.,M.Si
Sekretaris	:	Nita Valenia, S.H., MH
Pencatat	:	Diana Pradipta Febriyanti, S.H.
Peserta Rapat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rembang;</li><li>2. Staf Ahli Bupati;</li><li>3. Inspektur Kab. Rembang;</li><li>4. Kepala BPPKAD Kab. Rembang;</li><li>5. Kepala BAPPEDA Kab. Rembang;</li><li>6. Kepala DPUTARU Kab. Rembang;</li><li>7. Camat Rembang;</li><li>8. Camat Sulang;</li><li>9. Camat Kragan;</li><li>10. Cammat Sumber;</li><li>11. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;</li></ol>
Kegiatan Rapat	:	Menyampaikan Materi
Kata	:	
Hasil Kesimpulan	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Judul Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li><li>2. Menimbang untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</li><li>3. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan definisi dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. NIR;</li><li>b. ZNT;</li><li>c. DBKB;</li><li>d. Tempat pembayaran yang ditetapkan;</li></ol></li><li>4. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni tentang Pemutakhiran data Subjek Pajak;</li><li>5. Ketentuan Pasal 6 sesuaikan dengan PMK No 85 Tahun 2024;</li></ol>
Rapat	:	

6. Ketentuan Pasal 12 sesuaikan dengan PMK Nomor 85 Tahun 2024;
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Besaran Persentase NJOP.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN REMBANG,

DEDHY NUGRAHA, S.H., MSi  
Pembina  
NIP. 19791206 200604 1 006